

## **BAB II**

### **CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2008 – 2012**

Pengembangan RENSTRA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2013-2017 tidak terlepas dari hasil analisis terhadap realisasi dan kinerja selama lima tahun terakhir sebagai implementasi rencana strategis FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2013-2017. Dengan demikian RENSTRA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2013-2017 merupakan kesinambungan dari renstra sebelumnya. Pada bagian ini digambarkan capaian kinerja dari implementasi RENSTRA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2008-2012 menurut kebijakan yang menjadi dasar analisis kebutuhan untuk menyusun kebijakan dan program bagi RENSTRA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2013-2017. Berikut gambaran capaian kinerja RENSTRA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Tahun 2008-2012 yang terdiri dari tujuh kebijakan.

#### **2.1. Pendidikan**

Peningkatan mutu dan kinerja akademik merupakan salah satu fokus pada implementasi kebijakan pendidikan pada RENSTRA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2008-2012. Capaian kinerja dalam bidang peningkatan mutu kinerja pendidikan ditunjukkan oleh berbagai indikator capaian seperti penyempurnaan kurikulum, pengembangan standar mutu akademik, dan monitoring pembelajaran. Layanan khusus juga diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi atau memiliki minat khusus baik berupa kurikulum yang fleksibel maupun bimbingan yang bersifat individual sehingga mahasiswa bersangkutan dapat lebih cepat lulus dari rata-rata mahasiswa lainnya. Dampaknya, rata-rata IPK mahasiswa pada program S1 dapat terus meningkat dengan rata-rata IPK diatas 3,00 diatas target RENSTRA. Layanan kepada mahasiswa terkait program akademik juga dilakukan melalui peningkatan pelayanan secara online sistem informasi akademik (siakad) dan pengembangan perkuliahan dengan sistem e-learning Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk mempermudah mahasiswa mengakses materi kuliah dan tugas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk meningkatkan pelayanan dan mutu akademik sudah secara online mahasiswa dapat melihat jadwal kuliah, nilai KHS dan KRS secara Online.

Kerjasama kelembagaan dalam bidang akademik dengan universitas dan lembaga lain baik didalam maupun diluar negeri terus bertambah, dikalangan pengelola fakultas telah tumbuh keinginan untuk go international dengan terus meningkatkan standar mutu dan bekerja sama dengan beberapa universitas dan fakultas diluar negeri dalam bidang penelitian, dan penulisan jurnal dan berbagai seminar seperti UMS Malaysia.

Disamping aspek-aspek yang capaiannya sudah berjalan seperti apa yang diharapkan, beberapa aspek lain masih memerlukan usaha keras untuk meningkatkannya, seperti daya saing alumni dalam merebut peluang kerja, akreditasi yang perlu ditingkatkan, dan rata-rata lama studi mahasiswa yang belum sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

Untuk melakukan upaya penjaminan mutu akademik dan mutu manajemen, pimpinan fakultas memiliki komitmen yang sangat kuat dan diwujudkan dalam kebijakan mutu dan sistem penjaminan. Penjaminan mutu fakultas secara internal berada dibawah koordinasi UPT Penjaminan Mutu dan secara eksternal melibatkan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) dan / atau lembaga lain yang berkompeten. Penjamin mutu internal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, baik strategi maupun proses, mengacu pada pedoman penjaminan mutu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional. Hal ini menjadi landasan kebijakan penjaminan mutu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang dilaksanakan berdasarkan ketetapan MP.IPMA-UJM-012.07.02 Manual prosedur implementasi penjaminan mutu akademik internal yaitu mengenai Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan Penjaminan Mutu.

Kegiatan penjaminan mutu yang dilakukan selama tahun pada rentang waktu 2008-2012, yaitu memfasilitasi, penjaminan mutu, melakukan monitoring dan evaluasi internal, penyusunan panduan evaluasi diri, mengukur kepuasan stakeholders, mereviu buku panduan penjaminan mutu dengan harapan dapat meningkatkan akreditasi prodi. Sejumlah isu strategis untuk menjadi fokus perhatian pada tahun yang akan datang adalah meningkatkan pemahaman sivitas akademika terhadap pentingnya mutu, keterlibatan stakeholders internal dalam penjaminan mutu, kapasitas tim penjamin mutu unit dasar dalam melaksanakan proses penjaminan mutu, penjaminan mutu eksternal yang bukan hanya BAN PT tetapi juga lembaga akreditasi lain seperti ISO, penjaminan mutu berbasis penelitian dan jejaring dengan perguruan lain dan Fakultas yang bersinergi.

## **2.2. Penelitian dan pengembangan**

Kesungguhan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam meningkatkan mutu riset tergambar dalam keberhasilan meningkatkan kemampuan dosen dalam manajemen dan metodologi riset serta pembuatan proposal penelitian yang bermutu. Hal ini ditunjukkan dengan didanainya beberapa judul penelitian yang bersifat kompetitif dan meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga lain dalam bidang penelitian. Keberhasilan ini berimplikasi terhadap peningkatan jumlah publikasi nasional maupun internasional dan penerbitan jurnal internasional. Beberapa proyek penelitian yang diraih Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik juga melahirkan beberapa buah inovasi yang telah diimplementasikan dalam pembelajaran. Sementara itu, implementasi hasil-

hasil penelitian pada pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat berbasis kemitraan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta, serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam keberhasilan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Namun demikian, mengingat masih sedikitnya perolehan HAKI, yakni hanya satu buah, usaha inovatif untuk mewujudkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang terkemuka dalam bidang akademik, riset, dan pengabdian pada masyarakat masih harus terus ditingkatkan.

Dalam upaya mengembangkan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2011 melalui Hibah PHP-PTS 2011 dari Dikti dengan pengembangan Lab. Komputer, Web Fakultas, sistem informasi akademik (siakad) dan e-learning (eluntas), serta perangkat jaringan Local Area Network (LAN) dan Wide Area Network (WAN) dengan jangkauan 90% Lokal Kampus untuk Wifi juga turut berpartisipasi dalam mengimplementasikan kepada dosen, karyawan dan mahasiswa.

### **2.3. Pengabdian Kepada Masyarakat**

Implementasi kebijakan pada masyarakat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik diarahkan untuk mewujudkan pengabdian yang bermutu dan sinergis dengan kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan kemitraan juga merupakan arah kebijakan pada bidang pengabdian pada masyarakat. Implementasi kebijakan pengabdian pada masyarakat ini mencakup kegiatan dengan berbagai bentuknya, program pengabdian berdasarkan rencana dari LP2M UNTAG '45 Samarinda, keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan pengabdian dari DP2M DIKTI, dan pengabdian melalui kegiatan inovasi dan kerjasama.

### **2.4. Kemahasiswaan**

Jumlah mahasiswa dalam lima tahun terakhir bertambah dari kisaran 81 mahasiswa Tahun 2008, 90 mahasiswa pada tahun 2009, 118 mahasiswa pada tahun 2010, 145 mahasiswa pada tahun 2011 dan 229 mahasiswa pada tahun 2012, dengan jumlah mahasiswa aktif sekitar 773 orang pada tahun 2012. Perkembangan ini menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat, selain merupakan tantangan bagi pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, para dosen dan staf administrasi untuk memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa. Berbagai program pembinaan kemahasiswaan serta banyaknya prestasi yang diraih oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada berbagai lomba tingkat Nasional maupun Internasional. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud meliputi optimalisasi penyaluran dana kemahasiswaan serta banyaknya prestasi yang diraih oleh mahasiswa Fakultas Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada berbagai lomba tingkat Nasional maupun Internasional. Kegiatan-kegiatan dimaksud meliputi optimalisasi penyaluran dana kemahasiswaan bagi organisasi kemahasiswaan, peningkatan layanan kemahasiswaan, beasiswa bagi mahasiswa, pelayanan santunan mahasiswa, dan layanan bimbingan konselling atau karir bagi mahasiswa terutama calon lulusan.

## **2.5. Modernisasi Kampus dan Fasilitas.**

Kegiatan manajemen asset dan fasilitas pada pelaksanaan RENSTRA 2008-2012 berfokus pada tiga aspek utama, yaitu : (1) menuntaskan pembangunan fasilitas kampus terutama 2 gedung dari proyek Sumbangan Pemprov Gedung D dan E, (2) membangun laboratorium bahasa sumbangan dari Perusahaan Bukit Baiduri (3). melengkapi berbagai infrastruktur dan sarana pendukung penggunaan fasilitas gedung-gedung tersebut, dan (4) menumbuhkan kesiapan berbagai komponen Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik baik pengguna maupun pengelola dalam menggunakan fasilitas gedung secara penuh. (4) pembangunan lab Komputer. Kesiapan pengelola aset dan fasilitas dikembangkan melalui kegiatan pelatihan pengelola aset dan fasilitas di tingkat Fakultas. Sementara itu, kepada pengguna aset dilakukan sosialisai manual dan tata tertib pengguna gedung dan fasilitas lainnya melalui berbagai media informasi kampus. Penerapan sistem manajemen aset dan fasilitas dengan prinsip sentralisasi pengelolaan dan desentralisasi pemanfaatan yang memungkinkan dilakukannya upaya resource sharing fasilitas antar fakultas oleh unit-unit kerja lain.

Kelengkapan infrastruktur dan sarana pendukung seperti tempat parkir dan pagar terus dilakukan pembenahan dan perbaikan. Kompleksitas dengan menambah jumlah tenaga pengaman kampus, dan peningkatan keterampilan tenaga pengamanan kampus. Sebuah isu penting lain yang perlu memperoleh perhatian dalam pengelolaan fasilitas adalah penataan jalan dan lalu lintas di lingkungan kampus beserta sistem perparkiran.

Aktivitas pengadaan dilakukan untuk memenuhi kelengkapan infrastruktur, sarana pendukung bagi penggunaan gedung baru, dan sarana-sarana penunjang perkuliahan. Mekanisme dan prosedur pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan mengacu pada ketetapan dan peraturan pemerintah yang berlaku, yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dibentuk panitia pengadaan barang dan jasa yang terdiri atas personel yang telah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh BAPPENAS, dan anggota panitia pengadaan selalu diperbarui setiap tahunnya. Untuk menilai kesesuaian antara rencana, proses, dan pelaksanaan pengadaan dilakukan audit oleh Satuan Audit Internal (SAI) proses pengadaan pada kurun waktu 2008-2012 dapat dilakukan tanpa ada keberatan dari pihak yang terlibat.

## **2.6. Peningkatan Jaringan ICT/TIK**

Pengelolaan jaringan Information and Communication Technologies (ICT) dan pengembangan manajemen sistem informasi Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berada dibawah koordinasi UPT Infokom. Pada kurun waktu 2008-2012, telah dilakukan upaya peningkatan upaya peningkatan bandwidth yang sangat signifikan dari 1 Mbps pada tahun 2011, 5 Mbps pada tahun 2012, dan direncanakan pada tahun 2014 menjadi 25 Mbps, penambahan server secara bertahap, penambahan hotspot, serta peningkatan jaringan fiber optic dari Telkom. Peningkatan fasilitas ini telah berdampak terhadap kemudahan dan kecepatan akses internet untuk mencari referensi kuliah dan riset. Implementasi program e-learning yang dapat menunjang dalam proses pembelajaran melalui internet untuk mempermudah mahasiswa mendapatkan materi kuliah dari dosen, dengan tetap mengutamakan tatap muka di kelas minimal 12 kali pertemuan dan target pertemuan kelas 16 kali. Informasi dapat juga diakses melalui web Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik [www.sospol.untag-smd.ac.id](http://www.sospol.untag-smd.ac.id) baik informasi akademik dan non akademik.

Pengembangan konten pembelajaran elektronik dan multimedia interaktif melalui program e-learning masih terus dikembangkan dengan program baru yang lebih fleksibel untuk mempermudah mahasiswa dan dosen. Pada tahun 2011 dilakukan pengembangan beberapa program e-learning (eluntas), sistem informasi akademik (siakad), sistem informasi keuangan (simkeu), sistem informasi kepegawaian (simpeg), keempat sistem tersebut diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen di Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

## **2.7. Penataan Kelembagaan dan Sistem Manajemen**

Dalam usaha memenuhi tuntutan Renstra 2008-2012 dan guna mewujudkan visi Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang mewujudkan sumberdaya manusia yang mandiri, kreatif, inovatif, konstruktif, dan berbudi luhur yang berorientasi pada IPTEK dan IMTAQ serta berwawasan kebangsaan. Sistem organisasi dan manajemen Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik disesuaikan dengan STATUTA UNTAG '45 Samarinda dan telah melakukan penataan tata pamong dan tata kelola kelembagaan secara hati-hati, cermat, sistemik, sistematis, transparan, dan akuntabel sehingga dapat berjalan lancar dan kondusif dengan melibatkan semua unit yang ada di Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penataan tata pamong sejalan dengan program DIKTI dalam mendorong perbaikan tata pamong perguruan tinggi dengan menyesuaikan peraturan yang ada dan berlaku.

Dalam aspek manajemen keuangan, sejak awal tahun 2012, Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah menyusun laporan keuangan tahunan sesuai dengan standar Akuntansi keuangan. Laporan keuangan tahunan sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan. Untuk menjawab tantangan penggunaan anggaran yang sesuai dengan BAN-PT tentang alokasi dana penggunaan anggaran pada awal tahun 2012 semua unit kerja untuk melaksanakan pekerjaannya harus membuat RAB yang disetujui oleh Rektor yang akan diteruskan ke Yayasan untuk dilaksanakan dalam pencairan dana dan pelaksanaan anggaran oleh masing-masing unit kerja dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran pada semester berjalan.

## **2.8. Penataan SDM**

Sejak tahun 2011 telah dilakukan revitalisasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) untuk meningkatkan kinerja dan layanan baik kepada mahasiswa dan masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah melaksanakan jam kerja mulai jam 08.00-16.00 dan untuk pelayanan sore hari sampai malam tetap ada petugas yang masuk sore. Sistem kepegawaian dibawah naungan Biro Administrasi Umum (BAU). Untuk mendukung SIMPEG digunakan juga finger scan sebagai alat pemantauan kehadiran pegawai. Model pengawasan ini telah dievaluasi pada tahun 2012. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik juga turut mendukung program tersebut.

Tenaga edukatif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada 2008 tercatat berjumlah 18 orang. Peningkatan kualifikasi akademik tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan teknisi dilakukan melalui pemberian izin studi lanjut ke jenjang pendidikan lanjutan pada jenjang S2, dan S3.

Mulai tahun 2012, secara bertahap dikembangkan pendekatan pengukuran kinerja/produktivitas dosen yang difokuskan pada kinerja akademik (Beban Kerja Dosen) yang disesuaikan dengan peraturan DIKTI maksimal seorang dosen kepatutan mengajar stara 16 sks maksimal dalam 1 semester. Berdasarkan kepada amanat UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, secara jelas dinyatakan bahwa tugas utama seorang dosen adalah melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS pada setiap semester. Yang selanjutnya diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No.48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi.

Sejumlah isu strategik dalam manajemen SDM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ke depan terkait dengan pengembangan dan implementasi sistem yang telah/sedang dikembangkan. Substansi materi perubahan/penyesuaian berkaitan dengan

status pegawai, pengadaan, terminasi, remunerasi/kompensasi, dan pengembangannya. Isu strategik lain berkaitan dengan upaya menumbuhkan mindset baru bagi seluruh pegawai yang difokuskan pada etos dan budaya kerja kearah yang lebih produktif, fokus pada kostumer, dan perbaikan mutu berkelanjutan. Sinergi antara implementasi sistem manajemen SDM berbasis kompetensi dan penumbuhan mindset baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja SDM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

## **2.9. Pengembangan Usaha**

Sejalan dengan berjalan waktu yang diemban oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kebijakan pengembangan usaha secara terus menerus dilakukan, seperti Koperasi Fakultas, Konsultan bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kerjasama dan usaha juga telah berperan aktif dalam merintis dan melaksanakan berbagai kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terutama dalam memfasilitasi penerimaan mahasiswa mitra kerjasama tersebut dengan bank Mandiri.

## **2.10. Peningkatan Kesejahteraan**

Implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan bagi dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada periode 2008-2012 telah dilakukan melalui skema pemberian insentif secara langsung maupun berbagai skema insentif yang berbasis kinerja. Pengelolaan dana kegiatan pengembangan pada unit kerja akademik memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas akademik pada unit kerja dan membuka peluang implementasi performance based insentive pada kegiatan tersebut. Insentif kinerja bulanan dan tunjangan manajemen merupakan bentuk nyata upaya peningkatan kesejahteraan yang dilakukan fakultas. Tunjangan Hari Raya, insentif kepanitian dan tunjangan pensiun merupakan bentuk lain upaya peningkatan kesejahteraan.

## **2.11. Pengokohan Kehidupan Beragama**

Kebijakan untuk memperkuat kehidupan beragama, pada periode 2008-2012 pada prinsipnya telah diimplementasikan melalui berbagai kegiatan rutin, kegiatan insidental, dan kegiatan sosial. Kegiatan ini dipusatkan dan dikoordinasi di mushola Nurul Fikri. Kegiatan rutin yang telah dilakukan melalui penyelenggaraan tutorial pendidikan agama Islam, ceramah keagamaan ba'da shubuh dan Isya, dan pelaksanaan sholat berjamaah. Aktivitas dalam kehidupan beragama yang bersifat insidental disesuaikan dengan even yang terjadi seperti peringatan hari agama, kegiatan bulan ramadhan dan Iedul Fitri, Iedul Adha, manasik haji dll. Disamping itu berbagai kegiatan sosial seperti qurban, bantuan bencana alam dan berbagai bantuan amal merupakan upaya nyata

menumbuhkan kehidupan beragama di lingkungan kampus UNTAG '45 Samarinda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik turut menjadi bagian dalam kegiatan tersebut.

## **2.12. Peningkatan Citra FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Pada awal implementasi RENSTRA 2008-2012, secara kelembagaan tugas penguatan citra FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK berada pada Pembantu Dekan III sekaligus sebagai humas. Namun demikian, dalam bidang pencitraan berbagai upaya telah dilakukan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada berbagai kesempatan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik juga mempromosikan diri baik di Koran maupun di Televisi Lokal, RRI dan TVRI. Penerbitan beberapa profil Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di buku kuning dan Profil Kopertis Wilayah XI Kalimantan. Upaya peningkatan citra Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik juga telah dilakukan dengan penerbitan profil Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada berbagai media massa dan juga di web Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penyelenggaraan seminar dan konferensi baik Nasional maupun Internasional dalam kurun 2008-2012 memiliki dampak pencitraan yang penting, sekaligus merupakan capaian tertinggi dalam bidang ini. Sayangnya, rintisan kerjasama belum dapat berkembang secara optimal. Demikian pula pada aspek penataan kelembagaan, fungsi kehumasan menjadi terhambat karena jabatan humas masih tergabung dengan Pembantu Dekan III. Kemitraan melalui kerjasama telah banyak dilakukan, baik dengan universitas/instansi di dalam maupun di luar negeri, seperti penyelenggaraan seminar bersama, pertukaran dosen dan mahasiswa telah berjalan dengan berbagai mitra universitas. Namun masih banyak memorandum of understanding (nota kesepahaman) yang belum ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama yang konkrit.